

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KADUBUNGBANG KECAMATAN CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG

Oleh : Muhammad Jafar
Dosen STISIP Banten Raya

Abstrak

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang besar kemajuan wilayah khususnya desa. Karena semakin sejahtera desa, akan menjadi multipliers Effect terhadap kemajuan daerah penyangga (buffer zone) suatu daerah yang akhirnya tidak ada lagi rakyat miskin di desa dan perbedaan tingkat kesejahteraan antara desa dengan kota, inilah yang akan penulis teliti dengan latar belakang di atas dengan mengambil judul penelitian "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang". Dari beberapa identifikasi permasalahan di atas, maka penulis memberikan fokus penelitian sesuai dengan judul yang penulis pilih yaitu; (1) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, serta (2) langkah-langkah optimalisasi Pengembangan Desa Wisata di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Deskripsi merupakan metode penelitian yang bertujuan mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Penelitian Deskriptif juga dapat diidentikkan sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, teliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh, jadi penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Kategori Kondisi Partisipasi masyarakat sebagaimana indikator tersebut, seluruh RT dan RW menjawab cukup untuk; (1) Suara/ Voice berupa Hak Menyampaikan Pendapat, (2) Akses terhadap kebijakan pemerintah desa, (3) Kontrol terhadap pengawasan kebijakan dan keuangan pemerintah. Selama ini diakomodir dan disampaikan pada saat rapat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa secara periodik, bahkan untuk beberapa Desa yang berada di sekitar kantor kepala desa, kegiatan penyampaian aspirasi dan pendapat dapat langsung bertemu aparatur pemerintah desa.

Sedangkan untuk Prospek Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Nuryanti, Wiendu. (1993), Untuk (1) Aksesibilitas jalan tergolong Baik, (2) Desa Kadubungbang Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya dengan kriteria cukup, (3) dukungan masyarakat dan aparat desanya cukup menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata, (4) Keamanan di desa tersebut terjamin, kriteria penilaian Cukup, (5)

belum tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, dengan kriteria penilaian Kurang, (6) Desa Kadubungbang Cukup Beriklim sejuk tapi tidak dingin karena topografi bukan merupakan pegunungan, (7) Wisata Desa Kadubungbang sangat berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, dengan indikator ini bernilai Sangat Baik, Desa Kadubungbang berada di jalur wisata sampai dengan Pantai Carita dan Anyer bahkan dengan Tanjung Lesung.

Kata Kunci : Pengembangan Desa

A. Pendahuluan

Kemajuan suatu daerah ditentukan dari kemajuan dari lingkup terkecil wilayahnya. Desa merupakan wilayah integral dari suatu negara yang mencerminkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dewasa ini desa dituntut untuk lebih cerdas dan inovatif disamping melimpahnya sumber daya dan sumber dana yang akan berputar di desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang besar kemajuan wilayah khususnya desa. Karena semakin sejahtera desa, akan menjadi **multipliers Effect** terhadap kemajuan daerah penyangga (**buffer zone**) suatu daerah yang akhirnya tidak ada lagi rakyat miskin di desa dan perbedaan tingkat kesejahteraan antara desa dengan kota, karena kedudukan dan peranannya saling melengkapi dalam siklus kehidupan antara desa dan kota.

Sesuai dengan definisi Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam latar belakang penelitian ini, bukan ingin menggali sejauhmana kesiapan Desa dalam menghadapi pelaksanaan Undang-undang Desa yang saat ini telah digulirkan dan diterjemahkan secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur pasal-pasal pelaksanaannya, namun terhadap aspek-aspek yang mendasari Desa memiliki Otonomi khusus, yaitu inovasi dan adat istiadat disamping kewenangan yang muncul akibat dari aturan-aturan pemerintah yang mencoba menjembatani antara konsep desentralisasi dan otonomi desa yang murni.

Desa memiliki wilayah yang lebih bersifat tradisional dan alami. Desa cenderung dengan gambaran pertanian dan perkebunan yang hijau dan subur. Maka desa diidentikkan

dengan kondisi masyarakat agraris dan wilayah yang memiliki pesona alam yang indah. Hal inilah yang menjadi sasaran penelitian yang merupakan latar belakang secara deskriptif menggambarkan apakah sumber daya alam yang dimiliki desa secara partisipatif dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya atau hanya sebatas eksploitasi dan sasaran program yang menguntungkan birokrasi namun sebaliknya menjauhkan masyarakat dari wilayahnya sendiri.

Lahirilah konsep desa wisata, yang mengemas Desa sebagai objek pariwisata dan objek masyarakat kota untuk berbondong-bondong menikmati keasrian dan keindahan pesona alam desa. Baik berupa air terjun, kolam pemancingan maupun kolam renang dengan mata air yang sejuk dan hijau alami, atau dengan konsep yang menggabungkan antara teknologi dengan alam seperti arung jeram, *flying fox*, *outbond*, dan lain halnya semata-mata untuk menciptakan peluang usaha dan peluang pendapatan asli bagi desa dan masyarakatnya.

Indonesia ramai dibicarakan sebagai *the lost atlantic* dimana kota atlantis yang diceritakan oleh *Plato* adalah Indonesia saat ini, hal ini tidak menutup kemungkinan karena Indonesia memiliki jutaan pesona alam yang indah disamping penemuan-penemuan keajaiban dunia dan peninggalan kerajaan-kerajaan di masa lampau. Kabupaten Pandeglang Khususnya yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten yang memiliki pesona keindahan yang beragam, dari keindahan pantai, sungai, gunung, bentang lahan persawahan dan perkebunan yang indah laksana permadani hijau yang terhampar. Bahkan setiap desa yang berjumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa di wilayah Kabupaten Pandeglang yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kecamatan masing-masing memiliki panorama dan keindahan yang beragam.

Pandeglang memang kaya akan keindahan alam disamping keragaman budaya dan tradisinya. Sebagaimana Visi Kabupaten Pandeglang yang mengharapkan *Maju dalam Bidang Pariwisata, Agribisnis yang berbasis Pedesaan*, mendorong desa-desa di wilayah kabupaten Pandeglang untuk menjadi jaring-jaring wisata yang akhirnya menjadikan pariwisata sebagai sendi sentral perbaikan kesejahteraan masyarakat disamping perubahan *mindset* untuk menciptakan masyarakat yang ramah dan berestetika dengan budaya yang mengusung kearifan lokal daerah.

B. Landasan Teori

Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, teori demokrasi maupun teori-teori pemberdayaan mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan esensi dasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Partisipasi berbasis pada “kesadaran individu untuk bertindak”. Kata “kesadaran” mengacu pada “proses internal” individu sebelum akhirnya ia memutuskan untuk (dan melakukan) tindakan. Pada titik terakhir ini ia mengalami proses transformasi dari “individu” menjadi “pelaku” atau “subyek”. Sementara “tindakan” menandakan bahwa ketika itu dilakukan sebenarnya individu tersebut telah menaruh “makna subyektif” pada “tindakan” itu. (Suryo Adi Pramono, 2004).

Makna “partisipasi” bersifat variatif sebagaimana “makna subyektif” yang dilekatkan oleh pelakunya. (Dalam hal pembangunan—dalam arti bukan secara fisik—aneka makna yang tertera pada tindakan partisipatif sebenarnya dapat pula menjadikan arah pembangunan tersebut tidak jelas, bila visi dan misi sebuah kabupaten tidak dirumuskan terlebih dahulu dan menjadi kesepakatan politik bersama). Secara umum dan sederhana kata “partisipasi” mengacu pada posisi pelaku sebagai “part” (bagian atau ambil bagian) atau sebagai “partner” (mitra).

Pemahaman yang pertama menempatkan pemahaman “partisipasi” pada posisi pelaku hanya “sekadar ambil bagian” atau “sekadar berperan serta”, dan lebih cenderung pada posisi “pinggiran atau marjinal”. Partisipasi lantas hanya dipadankatakan dengan “ikut serta” atau “peran serta”, yang pada proses terbentuknya “tindakan” tersebut tidak diawali dengan proses internal kesadaran yang menumbuhkan dorongan untuk “berprakarsa” atau “berinisiatif” atau “mengawali” suatu tindakan (bersama). Prakarsa dilakukan pihak lain, kemudian warga diikutsertakan saja.

Sedangkan pemahaman kedua mempertautkan partisipasi dengan kata “partner” yang dapat kita tafsirkan lebih bermakna: (1) ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”; (2) mempunyai kesetaraan atau kesederajadan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain (*the others*); (3) masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut; (4) masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama (setidaknya mirip atau himpit) dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut; dan (5) tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang kesadaran” secara sadar sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Cohen dan Uphoff, (1980) mengungkapkan bahwa Partisipasi dimaknai juga sebagai keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil itu.

Sedangkan secara substansif Partisipasi mencakup beberapa hal, yaitu; (1) **Voice** (suara) artinya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat dan dijadikan basis pembuatan keputusan, (2) **Akses**,

yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan termasuk akses dalam pelayanan publik. (3) **Kontrol**, yakni setiap warga atau elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah. (Sutoro Eko, 2003).

C. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mac Iver dan Page, dalam bukunya *Society an Introductory Analysis: Macmillan & Co.Ltd* (1961) mengatakan bahwa 'Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan- kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah'.

Sedangkan menurut Selo Sumardjan dalam kuliah-kuliah Pengantar Sosiologi pada Fakultas Hukum dan Fakultas I. P. K UI tahun ajaran 1968, "masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan". Unsur-unsur dari masyarakat sendiri meliputi; (1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak/angka yang pasti yang menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah 2 (dua) orang yang hidup bersama, (2) Bercampur untuk waktu yang lama. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru melalui pemikiran-pemikiran. (3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, (4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lain, (Selo Sumardjan, 1968)

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang meliputi populasi, kebudayaan, hasil-hasil kebudayaan material, organisasi sosial serta lembaga-lembaga sosial dan sistemnya, dimana mempunyai suatu tujuan bersama dan tinggal dalam satu kawasan yang sama pula.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Cara penggalan data melalui observasi lokasi penelitian yaitu potensi-potensi Desa Kadubungbang disamping potensi alam dan potensi religius yang dijadikan potensi wisata, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat serta informan yang bersifat *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu beberapa pengambil kebijakan di daerah, yaitu camat, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan beberapa aparatur di Dinas Pariwisata serta berbagai macam lapisan

masyarakat dengan pertimbangan agar data yang didapatkan akan lebih dapat mewakili populasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, selain terkenal dengan pesona alamnya yang asri, lahan persawahan yang menguning ketika masa panen tiba juga memiliki keindahan lain yang tidak banyak orang ketahui. Desa ini memiliki pesona wisata. Desa Kadubungbang memiliki objek wisata berupa Pemandian dengan sumber mata air yang jernih dan sejuk, disamping wisata religius berupa kolam yang terdapat didalamnya sebuah batu yang mirip Batu Qur'an, dan beberapa tempat Ziarah karena mengandung sejarah penyebaran Agama Islam di Tanah Banten.

E. Prospek Pengembangan Desa Kadubungbang sebagai Desa Wisata

Apabila melihat secara keseluruhan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 terkait Rencana Induk Kepariwisata, Desa Kadubungbang merupakan bagian dari Kecamatan Cimanuk dimana pasal 13 poin (c) Mempertegas Kota Mandalawangi, Cadasari, dan **Cimanuk** sebagai *hinterland* Kota Pandeglang dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan komoditas dan jalur **destinasi wisata**. Pada kenyataannya Desa Kadubungbang yang memiliki pemandian Cikoromoy dan wisata ziarah Cibulakan Batu Qur'an lebih banyak yang bersifat dibangun dan cenderung digolongkan kepada Wisata Hasil Buatan Manusia bukan asli wisata alamiah yang bercirikan Desa Wisata.

Namun dalam pengamatan penulis sepanjang penelitian, menemukan banyak sekali prospek-prospek kawasan yang dapat dikelola dan digolongkan sebagai Desa Wisata. Misalnya wilayah desa di Kampung Cibaru, disamping merupakan bagian dari kaki gunung Pulosari, juga memiliki pemandangan yang sangat indah, banyak wisatawan yang melintasi di wilayah tersebut berhenti untuk sekedar mengambil gambar atau beristirahat sejenak memandangi kaki gunung pulosari yang penuh dengan lahan persawahan dan pertanian. Kawasan yang dilihat mirip lembah di daerah bogor tersebut atau di daerah lembang bandung barat ini, memang memiliki iklim yang tidak terlalu sejuk. Hal ini disebabkan oleh wilayah topografi yang dekat dengan jalur pantai ke arah Pantai Carita di Kecamatan Carita dan Labuan.

Kawasan Pariwisata yang bertemakan pegunungan sesuai dengan Rencana Induk Kepariwisata (2014), diantaranya adalah Kawasan Pariwisata Gunung Karang yaitu Sumur Tujuh, Makam Simpeureun, Pariwisata Kota Pandeglang, Pemandian Air Panas Cisolong, Batu Lingga, Air Panas Wariang, Agrowisata Akarsari, Agrowisata Cihunjuran, **Penziarahan Cibulakan, Pemandian Cikoromoy** dan Batu Tapak Pasir Peuteuy.

Kawasan Wisata di atas, sebenarnya telah ada sejak lama dan hal tersebut telah membuat tingkat kesadaran masyarakat akan usaha jasa wisata semakin tinggi, namun masyarakat secara tidak normatif atau tidak sesuai dengan ketentuan, membuka usaha-usaha kecil berupa warung-warung disekitar objek wisata atau kawasan yang terlihat banyak dijadikan daerah kunjungan atau peristirahatan.

Pada prinsipnya, dari persyaratan untuk dilakukan pengembangan sebagai Desa wisata Kadubungbang, yaitu melalui indikator antar lain; (1) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. (2) Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata, (3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya, (4) Keamanan di desa tersebut terjamin, (5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, (6) Beriklim sejuk atau dingin, (7) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Secara umum Indikator persyaratan untuk menjadi Desa Wisata Kadubungbang melalui Observasi di lapangan, sebagai berikut :

- (1) Untuk Aksesibilitas jalan sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi dengan hasil observasi menunjukkan kriteria **Baik**, hal ini ditunjukkan posisi jalan yang memiliki akses diantara jalur wisata mengger – carita, dan Batu bantar – cimanuk, meskipun berlubang dan sempit namun dengan kondisi yang layak dilalui hal ini tidak jadi masalah.
- (2) Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata dengan hasil observasi menunjukkan kriteria penilaian **Cukup**, dengan kondisi alam yang tidak kalah memiliki pemandangan yang indah, seni dan budaya dpat dikolaborasi dengan kesenian khas Pandeglang berupa debus dan marawis, kemudian terkait dengan legenda Desa Kadubungbang untuk Pemandian Cibulakan sangat kental dengan religius dan sejarah kesultanan banten dan cirebon.
- (3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya dengan hasil observasi menunjukkan penilaian **Cukup**, hal ini pastinya masyarakat semua terlibat dan berpartisipasi aktif dikarenakan semakin banyak wisata yang datang, usaha dan pelayanan jasa juga akan bertambah sehingga menambah penghasilan.

- (4) Keamanan di desa tersebut terjamin, kriteria penilaian **Cukup** dengan pertimbangan bahwa di desa Kadubungbang khususnya di area wisata jarang ditemukan kehilangan maupun hal-hal yang mengganggu ketertiban umum.
- (5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, kriteria penilaian **Kurang**, dengan pertimbangan bahwa belum adanya penginapan atau hotel, serta tidak adanya jalur telekomunikasi seperti telepon umum dan sebagainya. Begitupun dengan tenaga kerja hal ini hanya ditangani oleh penduduk setempat saja. Sepanjang observasi penulis memang belum terbangun apa yang dipersyaratkan dalam indikator ini.
- (6) Beriklim sejuk atau dingin, kriteria penilaian untuk ini **Cukup**, dengan pertimbangan bahwa jika dibandingkan dengan sejuknya daerah pegunungan di wilayah pulosari atau seperti di Ciwidey Bandung atau Lembang, iklimnya masih terasa hangat.
- (7) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, kriteria penilaian untuk indikator ini bernilai **Sangat Baik**, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan Rencana Induk Kepariwisataaan (2014) Desa Kadubungbang berada di jalur wisata sampai dengan **Pantai Carita dan Anyer** bahkan dengan **Tanjung Lesung**.

F. Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang

Menguji partisipasi warga tidak terlepas dai peran Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW. Ada sekitar 23 (dua puluh tiga) RT dan empat RW di Desa Kadubungbang yang menjadi kepanjangan tangan dalam pelayanan di masyarakat. Indikator yang menjadi Penilaian terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Kadubungbang sebagaimana tabl di bawah ini.

Untuk tiga indikator tersebut, seluruh RT dan RW menjawab **Cukup** untuk; (1) Suara/ Voice berupa Hak Menyampaikan Pendapat, (2) Akses terhadap kebijakan pemerintah desa masih, (3) Kontrol terhadap pengawasan kebijakan dan keuangan pemerintah. Selama ini diakomodir dan disampaikan pada saat rapat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa secara periodik, bahkan untuk beberapa Desa yang berada di sekitar kantor kepala desa, kegiatan penyampaian aspirasi dan pendapat dapat langsung bertemu aparat pemerintah desa.

G. Faktor Penghambat Pengembangan Desa Wisata di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang

Faktor penghambat lebih banyak ditandai dengan kualitas SDM di tingkat Desa serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan bagi wisatawan, sebagaimana dipaparkan oleh Penjabat Kepala Desa kadubungbang.

Pengembangan Desa Wisata Kadubungbang memang kembali kepada komitmen dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa, karena masyarakat setempat hanya melakukan sesuatu atas *naluri* dan *tuntutan kebutuhan*, sementara ketegasan regulasi adalah kewajiban dari aparat. Disamping itu lokasi pariwisata sebageian besar masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat, tanpa peran dan bimbingan dari Pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa terjadi tumpang tindih pengelolaan disebabkan lahan wisata yang dimiliki perorangan, Pengelolaan Wisata tidak dilakukan secara profesional disebabkan keterbatasan modal dan anggaran dana pemerintah digunakan tidak tepat sasaran, disamping itu telah terjadi *Rivalitas* dimana Pemerintah lebih cenderung menjadi pesaing dari pengelolaan wisata swasta atau perorangan dibanding menjadi pendukung dan penyokong kemajuan wisata yang sudah ada, hal ini didukung dengan regulasi yang tidak tegas oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata mengakibatkan *improvisasi masyarakat* dalam pungutan lahan parkir dan retribusi wisata yang tidak jelas.

Hal ini terjadi akibat belum adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata alam di desa, Desa Wisata dianggap sebagai hal yang mustahil karena tanpa pendanaan yang besar yang dimiliki oleh swasta atau perorangan, masyarakat desa enggan untuk melakukan pengelolaan secara profesional, Aset Wisata Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata cenderung rawan di *klaim* oleh Pihak lain yang tidak bertanggung jawab dikarenakan kelemahan dasar kepemilikan.

H. Simpulan

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kondisi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Serta mencari Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong Pengembangan Desa Wisata di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

Kategori Kondisi Partisipasi masyarakat sebagaimana indikator tersebut, seluruh RT dan RW menjawab **cukup** untuk; (1) Suara/ Voice berupa Hak Menyampaikan Pendapat, (2) Akses terhadap kebijakan pemerintah desa, (3) Kontrol terhadap pengawasan kebijakan dan keuangan pemerintah. Selama ini diakomodir dan disampaikan pada saat rapat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa secara periodik, bahkan untuk beberapa Desa yang

berada di sekitar kantor kepala desa, kegiatan penyampaian aspirasi dan pendapat dapat langsung bertemu aparat pemerintah desa.

Sedangkan untuk Prospek Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Nuryanti, Wiendu. (1993), Untuk (1) Aksesibilitas jalan tergolong **Baik**, (2) Desa Kadubungbang Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya dengan kriteria **cukup**, (3) dukungan masyarakat dan aparat desanya **cukup** menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata, (4) Keamanan di desa tersebut terjamin, kriteria penilaian **Cukup**, (5) belum tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, dengan kriteria penilaian **Kurang**, (6) Desa Kadubungbang **Cukup** Beriklim sejuk tapi tidak dingin karena topografi bukan merupakan pegunungan, (7) Wisata Desa Kadubungbang sangat berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, dengan indikator ini bernilai **Sangat Baik**, Desa Kadubungbang berada di jalur wisata sampai dengan **Pantai Carita dan Anyer** bahkan dengan **Tanjung Lesung**.

Beberapa Kendala yang menjadi faktor penghambat pengembangan desa wisata di Desa Kadubungbang yaitu :

- (1) Lokasi Wisata Desa Kadubungbang sudah masuk dalam Rencana Induk Kepariwisata menurut Perda Nomor 6 Tahun 2014, namun sampai dengan saat ini tempat-tempat wisata tersebut masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat, tanpa peran dan bimbingan dari Pemerintah daerah yang maksimal.
- (2) Pengelolaan Wisata tidak dilakukan secara profesional disebabkan keterbatasan modal dan anggaran dana pemerintah serta digunakan tidak tepat sasaran.
- (3) Telah terjadi **Rivalitas** dimana Pemerintah lebih cenderung menjadi pesaing dari pengelolaan wisata swasta atau perorangan dibanding menjadi pendukung dan penyokong kemajuan wisata yang sudah ada.
- (4) Regulasi yang tidak tegas oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata mengakibatkan **improvisasi** masyarakat dalam pungutan lahan parkir dan retribusi wisata yang tidak jelas.
- (5) Masih Rendahnya Tingkat SDM di Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata,
- (6) Masih Rendahnya Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata alam di desa.
- (7) Desa Wisata dianggap sebagai hal yang mustahil karena tanpa pendanaan yang besar yang dimiliki oleh swasta atau perorangan, masyarakat desa enggan untuk melakukan pengelolaan secara profesional.

Daftar Pustaka

Bill Foster dan Karen. R. Seeker, *“Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan”*, Jakarta: , 2001

Buku Panduan PKB PT Doulton Balaraja Tangerang 2010

Buku Panduan Sejarah PT Doulton Balaraja Tangerang 2010

Handoko, T. Hani, *“Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia”*, Yogyakarta: BP, 2001.

Hasibuan Melayu S.P, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Hessel Nogi. S. Tangkilisan, *“Manajemen Modern Untuk Sektor Publik”*, Balairung, 2003.

Ike Kusdyah Rahmawati, SE,MM, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008.

I Made, Yusa Dharmawan. 2011. Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Disiplin dan Kinerja Karyawan Hotel Nikki Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar

Mangkuprawira Shafri dan Aida Vitayala Hubeis, 2007 *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta

Manullang M. Marihot. AMH. Manulang, *“Manajemen Personalia”*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001.

Melayu Hasibuan, S.P. Malayu, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Revisi”*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 2001.

Prabu A.A. Anwar Mangkunegara, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”*, Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2009

_____, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”*, Bandung: Rosdakarya , 2002.

Rivai, Vethzal dan Sagala, Jauvani, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan”*, Jakarta: Rajawali Press, 2004 P.323

Sadili Samsudin, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Setyowati, Trias. 2011. Analisis Pengaruh Faktor Motivasi, Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja di Universitas Muhammadiyah Jember. Tesis

Simamora, Henry, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi ketiga, cetakan kedua, Penerbit : YKPN, Yogyakarta

Soekidjo Notoatmojo, *“Pengembangan Sumber Daya Manusia”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Supriyadi Andhi, 2005. Analisis Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Pemberdayaan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada PT. Bina Guna Kimia). Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Sutrisno, Edi, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Jakarta: Prenada Group, 2009

Syafri Mangku Prawira, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Triguno, *“Budaya Kerja Organisasi, Pemerintah”*, Yogyakarta: Lembaga Administrasi dan Co, 2003

Umar Husein, *“Riset Sumber Daya Manusia”*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2000 P.3